

PERAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA AGRIBISNIS KELAPA SAWIT RAKYAT: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Hermanto^{1*}

¹ Program Studi S-1 Agribisnis, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka

*Corresponding email : her.onsynewzealand@gmail.com

Abstrak: Agribisnis kelapa sawit rakyat memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi berbagai permasalahan seperti rendahnya produktivitas, keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya manajemen keuangan, serta belum optimalnya implementasi kebijakan publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan penguatan akuntabilitas keuangan dan efektivitas kebijakan publik dalam meningkatkan kinerja agribisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran akuntabilitas keuangan, menganalisis kontribusi kebijakan publik, serta mensintesis dampak keduanya terhadap peningkatan kinerja agribisnis kelapa sawit rakyat. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan mengkaji berbagai literatur ilmiah yang relevan dari jurnal nasional dan internasional, laporan kebijakan, serta dokumen resmi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan berperan dalam meningkatkan efisiensi biaya, pengambilan keputusan, serta akses terhadap pembiayaan formal seperti KUR dan PSR. Sementara itu, kebijakan publik berfungsi sebagai katalisator melalui program peremajaan sawit, sertifikasi keberlanjutan (ISPO/RSPO), serta pendampingan teknis yang mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing. Sintesis menunjukkan bahwa integrasi antara akuntabilitas keuangan dan kebijakan publik secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja agribisnis, baik dari aspek ekonomi maupun keberlanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua faktor tersebut bersifat saling melengkapi dan perlu diimplementasikan secara sinergis untuk mencapai kesejahteraan petani dan keberlanjutan sektor kelapa sawit rakyat.

Kata kunci: akuntabilitas keuangan, kebijakan publik, agribisnis kelapa sawit, kinerja usaha, systematic literature review

***Abstract:** Smallholder oil palm agribusiness plays a strategic role in Indonesia's economy; however, it faces several challenges, including low productivity, limited access to financing, weak financial management, and suboptimal implementation of public policies. These issues highlight the need to strengthen financial accountability and enhance the effectiveness of public policies in improving agribusiness performance. This study aims to examine the role of financial accountability, analyze the contribution of public policies, and synthesize their combined impact on the performance of smallholder oil palm agribusiness. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) method by analyzing relevant scientific literature from national and international journals, policy reports, and official documents. The findings indicate that financial accountability improves cost efficiency, decision-making, and access to formal financing such as microcredit schemes and replanting programs. Meanwhile, public policies act as catalysts through replanting initiatives, sustainability certifications (ISPO/RSPO), and technical assistance that enhance productivity and competitiveness. The synthesis reveals that the integration of financial accountability and public policy significantly contributes to improved agribusiness performance in both economic and sustainability aspects. This study concludes that these two factors are complementary and should be implemented synergistically to achieve farmer welfare and sustainable development in the smallholder oil palm sector.*

***Keywords:** financial accountability, public policy, oil palm agribusiness, business performance, systematic literature review*

PENDAHULUAN

Sektor agribisnis kelapa sawit merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, devisa negara, serta penyerapan tenaga kerja (Harianti dkk, 2025). Industri perkebunan kelapa sawit rakyat memegang peranan penting karena menyumbang porsi yang besar terhadap produksi nasional sekaligus menjadi sumber penghidupan bagi jutaan petani di berbagai daerah. Namun demikian, di tengah kontribusinya yang strategis, agribisnis kelapa sawit rakyat masih dihadapkan pada berbagai tantangan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Secara global, industri sawit menghadapi tekanan terkait isu keberlanjutan, tuntutan standar lingkungan, serta persaingan pasar internasional yang semakin ketat. Di tingkat mikro, petani sawit rakyat

umumnya memiliki produktivitas yang lebih rendah dibandingkan perkebunan besar, yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan praktik budidaya yang baik (Rizal P. Lubis, & Abdiyanto, 2024). Lemahnya manajemen usaha, khususnya dalam hal pencatatan dan pengelolaan keuangan, serta ketergantungan terhadap tengkulak, menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah dalam rantai nilai agribisnis.

Akuntabilitas keuangan menjadi salah satu faktor kunci yang dapat mendorong peningkatan kinerja agribisnis kelapa sawit rakyat (Aswar dkk, 2025). Penerapan pencatatan keuangan yang tertib dan transparan tidak hanya membantu petani dalam mengelola biaya produksi secara efisien, tetapi juga mendukung proses pengambilan keputusan usaha yang lebih rasional dan berbasis data. Prasyarat penting dalam memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan formal, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Di samping itu, praktik pengelolaan keuangan yang baik dapat memperkuat kelembagaan petani, seperti koperasi dan kelompok tani, sehingga mampu meningkatkan posisi tawar dalam pemasaran hasil produksi. Namun, peningkatan kinerja agribisnis tidak hanya bergantung pada kapasitas internal petani, tetapi juga memerlukan dukungan eksternal melalui kebijakan publik yang tepat sasaran.

Kebijakan publik memiliki peran strategis sebagai instrumen intervensi dalam mengatasi berbagai keterbatasan yang dihadapi petani sawit rakyat. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai program, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas melalui penggunaan bibit unggul, Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperluas akses pembiayaan, serta sertifikasi ISPO/RSPO untuk mendorong praktik perkebunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing di pasar global (Harianti dkk, 2025). Pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan dan pelatihan juga menjadi bagian penting dalam kebijakan pengembangan agribisnis sawit rakyat. Kebijakan-kebijakan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mengatasi kegagalan pasar dan kesenjangan struktural yang selama ini menghambat perkembangan petani kecil. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan publik seringkali masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, seperti rendahnya literasi keuangan petani, keterbatasan kelembagaan, serta kurangnya integrasi antara program yang satu dengan lainnya.

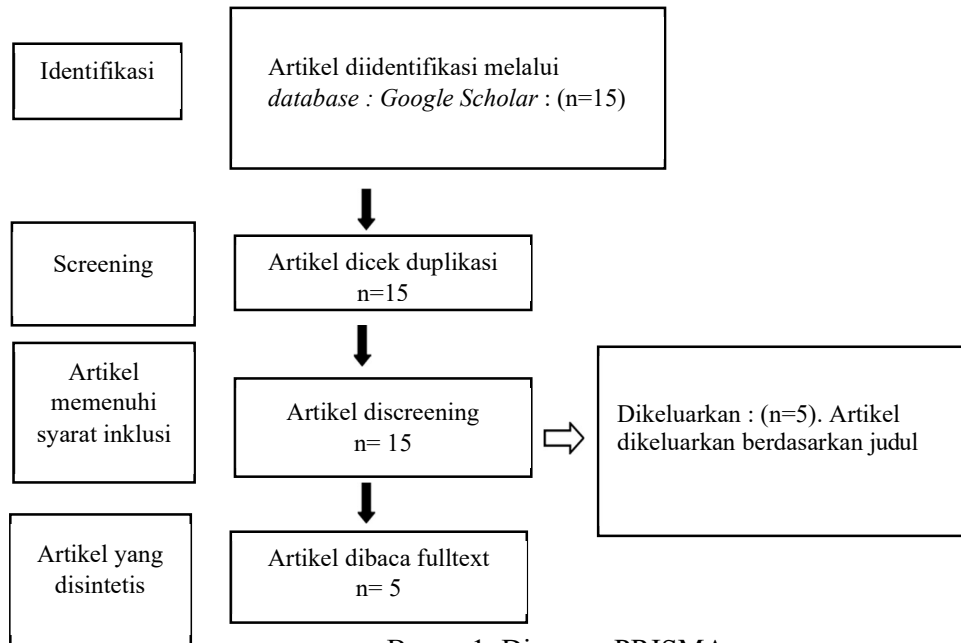
Peran akuntabilitas keuangan dalam meningkatkan kinerja agribisnis kelapa sawit rakyat, menganalisis kontribusi kebijakan publik dalam mendukung pengembangan sektor tersebut, serta mensintesis dampak integrasi keduanya terhadap peningkatan produktivitas, pendapatan, dan keberlanjutan usaha petani (Ketaren, 2025). Hasil artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian agribisnis dan tata kelola, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis secara sistematis berbagai hasil penelitian terkait peran akuntabilitas keuangan dan kebijakan publik dalam meningkatkan kinerja agribisnis kelapa sawit rakyat. Proses SLR dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penentuan pertanyaan penelitian, penelusuran literatur pada database ilmiah seperti Google Scholar, Scopus, dan ScienceDirect dengan kata kunci yang relevan, serta penetapan kriteria inklusi dan eksklusi (misalnya artikel terbit dalam 10 tahun terakhir, berbahasa Indonesia atau Inggris, dan memiliki relevansi langsung dengan topik). Selanjutnya dilakukan proses seleksi artikel, ekstraksi data, dan analisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, temuan utama, serta kesenjangan penelitian. Hasil sintesis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan komprehensif mengenai kontribusi akuntabilitas keuangan dan kebijakan publik terhadap peningkatan kinerja agribisnis kelapa sawit rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses seleksi artikel mengikuti pedoman dari *Preferred Reporting Systematic Reviews and Meta-analysis (PRISMA)* dan terdiri dari beberapa tahap. Tahap awal melibatkan pencarian artikel, dan pada tahap ini, jumlah artikel yang ditemukan dalam periode tahun 2020-2025 adalah sebanyak 15 artikel. Kemudian, dilanjutkan dengan tahap *screening*, di mana artikel-artikel ini dianalisis lebih lanjut. Setelah proses *screening*, sebanyak 5 artikel dipilih untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap berikutnya adalah evaluasi kualitas artikel, di mana setiap artikel diperiksa untuk memastikan keandalan dan kualitasnya. Hasil dari tahap evaluasi ini adalah bahwa 5 artikel memenuhi syarat dan layak disertakan dalam laporan akhir kajian dari pustaka. Ini mencerminkan proses seleksi artikel yang ketat dan sistematis sesuai dengan panduan PRISMA.



Bagan 1. Diagram PRISMA

Tabel 1. Tabel Perlindungan Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual

No	Penulis & judul	Tujuan	Hasil
1	Systematic literatur review environmental social and governance (esg) sektor agribisnis dan perkebunan pada badan usaha milik negara (bumn) (siagian et al., 2026)	Memetakan perkembangan dan karakteristik riset akademik mengenai praktik environmental, social, and governance (esg) pada badan usaha milik negara (bumn) di sektor agribisnis dan perkebunan, dengan mengidentifikasi tren publikasi, fokus tematik, serta pendekatan metodologis yang digunakan dalam studi-studi terkait	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian esg pada bumh sektor agribisnis dan perkebunan masih sangat terbatas, dengan hanya ditemukan enam artikel yang relevan dalam rentang waktu 2015–2025. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus pada hubungan antara pengungkapan esg dan kinerja keuangan perusahaan.
2	Dampak kelapa sawit dalam pembangunan berkelanjutan: analisis	Dampak komoditas kelapa sawit terhadap pembangunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam problem stream terdapat berbagai permasalahan lingkungan seperti deforestasi,

	kebijakan publik(rani, 2025)	berkelanjutan dalam perspektif kebijakan publik, khususnya dalam kerangka ekonomi hijau (green economy) yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan	pencemaran air, dan penurunan populasi satwa liar, serta permasalahan sosial seperti konflik lahan dan ketergantungan masyarakat terhadap industri kelapa sawit, disertai tantangan ekonomi berupa kerugian akibat kebijakan uni eropa. Pada policy stream, pemerintah telah menginisiasi berbagai program seperti kebijakan biodiesel b30 dan sertifikasi ispo sebagai upaya mendukung keberlanjutan sektor sawit.
3	Sinkronisasi kebijakan kelapa sawit berkelanjutan (rifky & anugrah, 2023)	Menganalisis peran rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (rad-ksb) dalam menyinkronkan berbagai kebijakan pemerintah yang tumpang tindih, baik secara vertikal maupun horizontal, serta untuk mengkaji upaya pemerintah daerah dalam mendorong keberlanjutan sektor kelapa sawit melalui integrasi program dan rencana strategis organisasi perangkat daerah (opd).	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rad-ksb menjadi instrumen penting dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta antarinstitusi terkait. Implementasi rad-ksb mendorong berbagai inisiatif seperti pengembangan kebun kelapa sawit berkelanjutan, pengelolaan limbah yang lebih efektif, serta peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan
4	Analisis kebijakan pengembangan komoditas kelapa sawit dan (abdurohman muzaki, 2024)	Menganalisis kebijakan pengembangan komoditas kelapa sawit di provinsi lampung serta dampaknya terhadap perekonomian petani, khususnya dalam aspek pemberdayaan petani, pengelolaan sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan.	Menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kelapa sawit di lampung memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan seperti fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern, serta permasalahan keberlanjutan lingkungan. Dampak ekonomi yang dirasakan petani sangat bergantung pada stabilitas kebijakan pemerintah, efektivitas sistem distribusi, serta adanya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petani
5	Multipersepsi program strategis nasional : peremajaan sawit rakyat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat perkebunan kelapa sawit dalam mendukung swasembada pangan sawit rakyat (psr) sejak tahun 2017 . Program ini bertujuan mengganti tanaman sawit (rahmawati et al ., 2023). Faktor-faktor penghambat dan perbedaan hasil implementasi di(harahap et al., 2025)	Mengkaji berbagai perspektif (multipersepsi) terhadap pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (psr) sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat perkebunan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan petani serta kontribusinya terhadap pencapaian swasembada pangan nasional.	Psr dipandang sebagai program strategis yang mampu meningkatkan produktivitas kebun, kesejahteraan petani, serta memperkuat kelembagaan ekonomi lokal. Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan. Namun demikian, implementasi psr masih menghadapi berbagai kendala, seperti hambatan administratif, keterbatasan akses pembiayaan, serta kurangnya pendampingan teknis bagi petani

Peran akuntabilitas keuangan dan kebijakan publik memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja agribisnis kelapa sawit rakyat, khususnya dalam konteks tata kelola yang berkelanjutan. Berdasarkan studi (Siagian et al., 2026), praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) pada sektor agribisnis dan perkebunan, khususnya di lingkungan BUMN, masih tergolong terbatas baik dari segi jumlah penelitian maupun kedalaman analisisnya. Namun demikian, fokus utama penelitian yang mengaitkan pengungkapan ESG dengan kinerja keuangan menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan faktor kunci dalam meningkatkan performa organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas keuangan tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik dan efisiensi operasional di sektor agribisnis.

Perspektif dalam pengambilan kebijakan publik bahwa industri kelapa sawit menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Permasalahan seperti deforestasi, pencemaran lingkungan, konflik lahan, serta tekanan global dari kebijakan internasional menjadi isu utama dalam problem stream. Pemerintah akan dituntut untuk mampu mengintegrasikan prinsip keberlanjutan melalui pendekatan green economy (Rani, 2025). Program seperti biodiesel B30 dan sertifikasi ISPO menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam merespons tantangan tersebut. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada tingkat akuntabilitas dalam implementasinya, sehingga diperlukan transparansi dan pengawasan yang kuat agar kebijakan benar-benar memberikan dampak positif bagi kinerja agribisnis sawit rakyat.

Pentingnya sinkronisasi kebijakan melalui implementasi Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB). Keberadaan RAD-KSB menjadi solusi atas permasalahan tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta antarinstansi terkait, koordinasi yang lebih baik, berbagai program seperti pengelolaan limbah, pengembangan kebun berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas petani dapat berjalan lebih efektif (Rifky & Anugrah, 2023). Akuntabilitas keuangan berperan sebagai instrumen pengendalian yang memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, efisien, dan tepat sasaran, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja sektor agribisnis sawit rakyat.

Hasil penelitian Muzaki (2024) menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan kelapa sawit di tingkat daerah, seperti di Provinsi Lampung, memiliki dampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani (Abdurohman Muzaki, 2024). Keberhasilan tersebut masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti fluktuasi harga komoditas, keterbatasan akses terhadap teknologi modern, serta isu keberlanjutan lingkungan. Stabilitas kebijakan dan efektivitas sistem distribusi menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Akuntabilitas keuangan menjadi elemen krusial dalam memastikan bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara efisien dan program-program pemberdayaan petani dapat berjalan optimal, termasuk dalam penyediaan pelatihan dan akses terhadap teknologi.

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang berperan dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani (Harahap et al., 2025). Program ini juga berkontribusi dalam memperkuat kelembagaan ekonomi lokal dan mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, implementasi PSR masih menghadapi berbagai tantangan, seperti hambatan administratif, keterbatasan pembiayaan, serta kurangnya pendampingan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, tanpa didukung oleh sistem akuntabilitas keuangan yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif, maka hasil yang dicapai belum optimal.

Sinergi antara akuntabilitas keuangan dan kebijakan publik merupakan faktor utama dalam meningkatkan kinerja agribisnis kelapa sawit rakyat (Ekayani et al., 2025). Akuntabilitas

keuangan berfungsi sebagai landasan dalam menciptakan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan, sementara kebijakan publik menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan pembangunan sektor sawit yang berkelanjutan. Integrasi keduanya mampu mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, serta keberlanjutan lingkungan. Namun demikian, diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperkuat koordinasi antar lembaga, meningkatkan kapasitas petani, serta memastikan konsistensi dan stabilitas kebijakan agar tujuan pembangunan agribisnis kelapa sawit rakyat dapat tercapai secara optimal.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dan kebijakan publik memiliki peran yang sangat penting dan saling melengkapi dalam meningkatkan kinerja agribisnis kelapa sawit rakyat. Akuntabilitas keuangan berfungsi sebagai landasan dalam menciptakan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan dalam pengelolaan sumber daya, sedangkan kebijakan publik menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan pembangunan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan. Berbagai program pemerintah seperti ISPO, RAD-KSB, dan PSR terbukti mampu mendorong peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, serta memperkuat tata kelola dan kelembagaan ekonomi di sektor agribisnis kelapa sawit rakyat.

Di sisi lain, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, keterbatasan pembiayaan, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya akses petani terhadap teknologi dan pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan kinerja agribisnis tidak hanya bergantung pada keberadaan kebijakan, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaan, efektivitas pengawasan, serta penguatan sistem akuntabilitas keuangan. Diperlukan upaya berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, serta memperkuat dukungan terhadap petani agar sektor kelapa sawit rakyat dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohman Muzaki, E. K. (2024). Analisis Kebijakan Pengembangan Komoditas Kelapa Sawit Dan. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (Juepa) Vol. 1 No. 2 Juli 2024 E-Issn: 3063-1920 (Online)*, 1(2), 31–43.
- Ekayani, F. | L. K. | M., Ayyubi, R. Y. | S. El, & Ermawati, T. I. | W. J. (2025). *Strategi Hilirisasi, Penguatan Ketahanan Pangan, Dan Sdm Untuk Reindustrialisasi Perekonomian Indonesia*. Ebook, Penerbit Ipb Press Jalan Taman Kencana No. 3, Kota Bogor - Indonesia.
- Harahap, H. W., Nabila, B. V., & Harahap, S. (2025). *Multipersepsi Program Strategis Nasional : Peremajaan Sawit Rakyat Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Mendukung Swasembada Pangan Sawit Rakyat (Psr) Sejak Tahun 2017 . Program Ini Bertujuan Mengganti Tanaman Sawit (Rahmawati Et Al ., 2023). Faktor-Faktor Penghambat Dan Perbedaan Hasil Implementasi Di. November, 1586–1604.*
- Harianti, La Panga, M. Syahadat, La Harudin, Hasriati, H. T. (2025). *Dasar-Dasar Ilmu Agribisnis Kelapa Sawit*. Pt. Nasya Expanding Manajemen.
- Ketaren, O. (2025). *Menata Ulang Operasional Perkebunan Strategi Kolaboratif Meningkatkan*. Alung Cipta.
- Muh. Al Aswar Rusman, Akbar, Jumiati, Nadir, Ardi Rumallang, M. I. S. (2025). *Agribisnis Tanaman Perkebunan Dan Hortikultura Berkelanjutan*. CV Azka Pustaka.
- Rani, N. (2025). Dampak Kelapa Sawit Dalam Pembangunan Berkelanjutan: Analisis Kebijakan Publik. *Jurnal Governansi, P-Issn 2442-3971 E-Issn 2549-7138 Volume 11*

- Nomor 1, April 202, 11(April), 73–82.*
- Rifky, A., & Anugrah, S. (2023). Sinkronisasi Kebijakan Kelapa Sawit Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik, Vol.14, No.3, 2023 P-Issn 1978-0680, E-Issn 2655-520, 14(3), 319–328.*
- Rizal P. Lubis, Abdiyanto, S. (2024). *Pertanian Berkelanjutan: Produksi Padi Dan Kesejahteraan Petani*. Serasi Media.
- Siagian, A. T., Muftiadi, A., & Rizal, M. (2026). *Systematic Literatur Review Environmental Social And Governance (Esg) Sektor Agribisnis Dan Perkebunan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn)*. 17, 1–11.